

# PEMASYARAKATAN SERTA KEMITRAAN ARKEOLOGI DI BALI, NTB, DAN NTT

Oleh : Ayu Kusumawati

## **Abstract**

*The socialization or development of management and archaeological friendship by Denpasar Archaeology Center has been done in some areas both in Bali and outside Bali. However, It can be said that there is not maximum result yet because of the lack of media or instruments and human resource. The media that we mean here is special organisation structure that handle the development of archaeology and standard reference books. In addition, there is lack of expert who take in hand the ways of archaeology management development.*

**Keyword:** Socialization of archaeology

## **I. Latar belakang**

Perubahan nama dari Asdep Urusan Arkeologi Nasional menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional mencerminkan suatu gagasan yang mengacu pada pengembangan pengelolaan data dan informasi arkeologi agar hasil penelitiannya dapat memberikan informasi arkeologi pada masyarakat luas. Lebih-lebih dalam nomenklturnya ada bidang penelitian dan pengembangan dan ada bidang dokumentasi dan publikasi. Dalam hal ini nama Puslitbang Arkeologi Nasional adalah berfungsi meneliti, mengembangkan dan mendokumentasikan serta menyebarkan informasi dari hasil penelitian arkeologi agar dapat bermanfaat kepada masyarakat. Apa yang dikemukakan oleh seorang birokrat Dirjen Kebudayaan pada saat pembukaan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi di Bedugul (tahun 2000) bahwa penelitian arkeologi tak ubahnya seperti danau Batur yang airnya melimpah tetapi sawah di sekitarnya atau tanah di sekelilingnya kering perlu diperhatikan. Kalimat ini tidak perlu ditanggapi secara emosi tetapi perlu introspeksi diri bahwa hal itu menjadi tantangan yang harus dibenahi. Keadaan seperti itu apabila benar maka tentu

ada kesalahan dalam penanganan arkeologi sendiri, tetapi ada juga unsur eksternal arkeologi yang berpotensi mengakibatkan adanya kendala tersebut.

Walaupun demikian langkah-langkah yang ditempuh oleh pimpinan PUSLITBANG Arkeologi Nasional dengan memperbaiki kinerja penelitian dan kebijakan penelitian yang berorientasi pada penelitian ecek-ecek (kecil-kecilan) dan spatial menjadi penelitian unggulan dengan mengedepankan pusat-pusat budaya yang dilakukan oleh Balai Arkeologi/Pusat merupakan langkah positif agar dalam suatu tahap penelitian menghasilkan sesuatu yang berguna dalam wawasan arkeologi.

Suatu penelitian yang dilakukan untuk menggali potensi arkeologi di suatu daerah sudah harus dibarengi dengan rencana penulisan buku sebagai bahan informasi arkeologi. Perubahan system penelitian dalam paket-paket besar (dana besar, waktu panjang, peneliti cukup, dan teknisi memadai) memberikan harapan akan menghasilkan laporan penelitian yang lebih berbobot, akurat, ilmiah dan akan berakhir pada hasil penelitian yang bersifat akademis. Alasan peneliti bahwa dana, waktu, tenaga, yang kurang cukup, sehingga laporan/naskah penelitiannya dangkal/kurang berbobot sudah tidak ada lagi. Dengan laporan atau naskah yang mempunyai wawasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sangat berpotensi untuk disebarluaskan ke berbagai pihak yang erat kaitannya dengan penelitian. Pihak-pihak yang perlu memperoleh informasi penelitian setelah diterbitkan antara lain:

- Pihak Pemda dimana tempat/lokasi penelitian diadakan,
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Pendidikan
- Fakultas/Perguruan Tinggi, dan lain-lain.

Sedangkan dengan hadirnya teknisi-teknisi yang ikut penelitian maka akan diperoleh data dokumentasi yang lengkap dan akurat. Dengan demikian maka untuk bahan-bahan dalam usaha menyebarluaskan informasi melalui pameran, seminar, penyuluhan dengan memanfaatkan data dari dokumentasi film, foto, gambar, peta dan lain-lain tidak akan mengalami kendala.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ahli dari berbagai bidang ilmu yang sudah terpadu dalam suatu penelitian maka memungkinkan eksplanasi dalam penulisan akan lebih akurat, luas dan

menyeluruh. Dengan cara penelitian yang menjunjung tinggi keterpaduan antar semua bidang penelitian (prasejarah, klasik, Islam dan Kolonial) maka penulisan seluruh temuan penelitian dapat dibagi kepada ahli-ahli dibidangnya. Dengan cara ini peneliti dapat menguasai aspek-aspek arkeologi yang sesuai dengan keahliannya untuk dijasikan buku atau makalah yang sangat penting dalam penyebaran informasi arkeologi.

Langkah-langkah yang menyangkut pembenahan secara internal ini sangat diperlukan. Tulisan-tulisan yang akan disebarluaskan kepada masyarakat harus memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai, jumlahnya harus cukup dan kualitasnya memenuhi standar yang diperlukan. Lebih-lebih hasil penelitian dari Puslitbang Arkeologi Nasional merupakan bahan acuan bagi mahasiswa, peneliti, pemerhati budaya, bahkan kadang-kadang penentu kebijakan di daerah kabupaten dan kota.

Secara tidak langsung struktur organisasi yang telah ada sekarang ini merupakan struktur yang merugikan karena pengendalian administrasi, bahkan kadang-kadang teknis Balai-Balai Arkeologi terlepas dari Puslitbang Arkeologi Nasional. Hal ini tentu akan mengurangi kinerja keterpaduan antara Pusat dan Balar.

Kenyataan menunjukkan bahwa arkeologi/budaya telah bergabung dengan pariwisata. Di wilayah kerja Balar yaitu di provinsi maupun kabupaten terdapat dinas-dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara tidak langsung bergabungnya Arkeologi ke Budpar membuka peluang bagi para peneliti untuk lebih memperluas cakrawala pengetahuan yang lebih menyentuh kepentingan pariwisata dan menyentuh kepentingan masyarakat. Ada sesuatu yang berbeda dengan konsep dan paradigma penelitian arkeologi sebelumnya. Dalam penelitian arkeologi hasil yang diperoleh bukan hanya untuk ilmu arkeologi tetapi tampaknya arkeologi merupakan obyek yang bersifat multisektor yang dapat dimanfaatkan untuk ekonomi, pariwisata, pengetahuan dan lain-lain. Hal ini membuka peluang lebih lebar untuk melakukan kerjasama dengan pemda untuk mendukung berbagai kepentingan di sana.

Dalam situasi sekarang ini, dimana otonomi daerah bergulir menimbulkan keinginan daerah untuk memanfaatkan sumberdaya arkeologi untuk kepentingan daerah, khususnya sebagai penunjang ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu maka sudah waktunya para peneliti jemput bola,

sehingga kepentingan dan perhatian daerah itu dapat dimanfaatkan. Langsung maupun tidak langsung kerjasama ini telah membuka wawasan bagi daerah tentang peranan arkeologi dalam pembangunan nasional.

## **II. Permasalahan**

Masalah penyebarluasan hasil penelitian arkeologi pada dasarnya bukan akibat sistem informasinya. Tetapi karena berbagai hal yang mencakup berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek internal
2. Aspek eksternal

Aspek internal mencakup pada berbagai hal yaitu :

- a) Masalah yang sangat klasik tetapi masih menjadi hambatan sampai sekarang, yaitu dana penyelenggaraan kegiatan operasional yang terbatas. Hal ini menyebabkan menumpuknya berbagai hasil laporan/tulisan di Balar.
- b) Kurangnya kesempatan untuk mengadakan berbagai kegiatan, pameran, seminar, penyuluhan, di wilayah kerja Balar.
- c) Kurangnya tenaga profesional yang dapat menangani secara khusus untuk menyebarluaskan informasi.
- d) Tidak tersedianya unit khusus penyebarluasan informasi di Balar.
- e) Tidak ada pola kerja yang mantap yang menjadi jembatan dan meningkatkan sinergi kegiatan penyebarluasan informasi antara Puslitbang-Balar, Balar - Kabupaten/Kota.
- f) Belum disusun langkah-langkah dan acuan tentang sistem informasi di wilayah kerja Balar.

Permasalahan yang bersifat eksternal

- a) Adanya struktur organisasi Puslitbang Arkenas yang berubah-ubah, yang mengurangi sinergi kinerja antara Pusat dan Balar.
- b) Selera pemerintah kabupaten dan kota dalam membentuk struktur organisasi daerah yang berbeda-beda antara satu dan lainnya yang menyebabkan rancunya pelaksanaan penyebaran informasi antara Balar dan Pemda.

- c) Kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam kegiatan penyebarluasan informasi dari hasil penelitian arkeologi, sehingga sulit menjadi partner untuk penyelenggaraan seminar, pameran, penyuluhan, penataran dan lain-lain yang diharapkan dapat memacu dan memicu penyebarluasan informasi arkeologi.

### **III. Pembahasan**

#### **3.1 Aspek-aspek dalam penyebaran informasi**

Kelancaran dalam pelaksanaan penyebaran informasi tergantung pada berbagai aspek, yaitu :

- 3.1.1 Aspek objek/siapa yang menerima informasi
- 3.1.2 Aspek sistem informasi (cara penyampaian)
- 3.1.3 Apa yang akan diinformasikan
- 3.1.4 Dalam bentuk apa informasi disampaikan
- 3.1.5 Siapa yang dapat menjadi partner penyampaian informasi
- 3.1.6 Manfaat informasi
- 3.1.7 Parameter bahwa informasi itu berhasil.

##### **3.1.1 Siapa yang akan menerima informasi**

Dalam peningkatan penelitian dan pengembangan arkeologi arus informasi mutlak diperlukan. Informasi akan sangat menentukan keberhasilan dari suatu unit organisasi termasuk Balai Arkeologi. Keberhasilan suatu unit yang memiliki tugas pokok penelitian dan pengembangan sangat ditentukan oleh seberapa jauh fungsi penelitian arkeologi dapat memacu pengetahuan arkeologi kepada masyarakat. Untuk tolok ukur dan parameter keberhasilan untuk Balai Arkeologi, maka perlu ditentukan kepada siapa informasi dapat disampaikan. Dalam hal ini kepada masyarakat yang mana informasi dapat diterimakan, sehingga tujuan penelitian arkeologi dapat dikatakan berhasil. Tidak semua masyarakat harus memperoleh informasi dari kegiatan penelitian arkeologi, karena tidak relevan. Misalnya masyarakat buruh pelabuhan,

pengemudi becak, angkot dan lain-lain. Untuk itu maka perlu pemilihan golongan-golongan masyarakat yang perlu memperoleh informasi antara lain:

1. Anak didik paling dini, siswa, mahasiswa, peneliti, pemerhati budaya
2. Para birokrat penentu kebijakan.
3. Lembaga-lembaga penelitian
4. Para guru/pengajar
5. Para wartawan
6. Pengelola museum, dan lain-lain.

### **3.1.2 Sistem Informasi**

Keberhasilan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat akan ditentukan oleh cara penyampaian informasi. Sistem informasi mencakup dalam berbagai aspek yaitu meliputi metode dan cara.

Dalam penyampaian informasi perlu penentuan siapa yang dapat menyampaikan informasi. Petugas pelaksana informasi erat kaitannya dengan bobot dan bentuk informasi yang akan disampaikan. Cara penyampaian informasi dapat dilakukan dengan:

- Ceramah, penyuluhan/penataran
- Seminar
- Pameran
- Festival
- Penyampaian informasi melalui ceramah harus disampaikan oleh ahlinya (arkeolog). Penceramah harus menguasai materi yang akan disampaikan. Disamping itu kepada siapa informasi akan disampaikan. Peserta ceramah akan selalu berubah, siswa, mahasiswa, pemerhati budaya, guru-guru, para birokrat di kabupaten/kota dan lain-lain. Dalam menghadapi hal ini sudah tentu penceramah akan menyiapkan materi ceramah yang cocok. Misalnya ceramah kepada siswa/mahasiswa harus memiliki bobot tertentu yang bernuansa ilmiah. Sedangkan ceramah untuk para birokrat harus disesuaikan

dengan tujuan penyampaian informasi. Birokrat adalah penentu kebijakan yang erat kaitannya dengan materi ceramah yang tidak hanya bertema pada pengetahuan arkeologi tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah penanganan/pengelolaan suatu situs. Demikian pula dalam penyuluhan/penataran juga harus mengingat siapa peserta penyuluhan dan materi apa yang perlu disampaikan.

- Dalam seminar, yang perlu diketahui adalah tema seminar harus sesuai dengan RIPAN, agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan-tujuan penelitian arkeologi. Seminar merupakan ajang untuk diskusi, yang akan melibatkan berbagai pihak di daerah. Karena tujuan seminar juga dihadiri oleh berbagai kalangan, peneliti, mahasiswa, siswa, pemerhati budaya, guru, dosen dan birokrat.
- Pameran merupakan suatu sarana untuk penyampaian informasi, yang akan tertuju kepada masyarakat luas, tidak terbatas pada suatu golongan tertentu. Oleh karena itu dalam penataan pameran harus memanfaatkan keterangan-keterangan yang jelas, singkat dan lugas. Hendaknya memilih bahan-bahan pameran yang mempunyai keterkaitan dengan situs-situs arkeologi daerah dimana pameran akan dilaksanakan.
- Kegiatan yang bersifat arkeologis dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan yang lain misalnya festival. Dalam festival, dapat dilakukan berbagai kegiatan yang bernuansa arkeologis misalnya lomba mengarang tentang objek arkeologi yang ada misalnya, candi, kubur-kubur megalitik, situs pemukiman, situs pemujaan, dan lain-lain. Juga dapat dilakukan misalnya dengan lomba menggambar suatu objek arkeologi.

### **3.1.3 Apa yang akan diinformasikan**

Bentuk suatu bahan informasi terediri atas berbagai hal, ada yang berupa booklet, leaflet, film, gambar, paper atau informasi lisan dan lain-lain. Segala bentuk informasi yang akan disampaikan hendaknya mempunyai standar kualitas. Tetapi yang penting bentuk informasi harus mempunyai kualitas tertentu yang memenuhi persyaratan. Suatu informasi harus disesuaikan dengan "kepada siapa" informasi diberikan, dan untuk tujuan apa informasi disampaikan. Bisa terjadi suatu informasi akan sia-sia tidak bermanfaat karena

tidak tepat pada sasaran. Hal ini mungkin dapat terjadi karena ada kesalahan seperti :

1. Informasi tidak cocok atau tidak sesuai dengan penerima informasi.
2. Informasi kurang menarik karena informasi dibuat dengan hanya berdasar pada kemauan pemberi informasi, bukan berdasar pada kepentingan yang diberi informasi.
3. Informasi harus disusun dalam bentuk yang menarik, mudah dimengerti, jelas, lugas dalam bahasa yang gampang dicerna oleh masyarakat dan bukan justru menyulitkan.
4. Informasi harus berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

#### **3.1.4 Dalam bentuk apa informasi disampaikan**

Mengingat bahwa Balai Arkeologi mempunyai tugas pokok dibidang penelitian dan pengembangan arkeologi, maka bentuk informasi bertitik tolak dari hasil penelitian arkeologi itu sendiri. Perlu diketahui bahwa penelitian arkeologi sekarang harus dimanfaatkan dan dapat menyentuh kepentingan masyarakat maka informasi harus mengedepankan fungsi penelitian arkeologi. Karena sampai sekarang masih banyak orang atau bahkan juga pejabat yang tidak mengerti peranan arkeologi dalam kehidupan seperti sekarang ini. Bahkan ada yang berpandangan arkeologi hanya melihat ke belakang (masa lampau) sementara orang hidup mementingkan masa kini dan masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi pandangan yang kurang tepat ini maka informasi hendaknya juga dapat berupa sosialisasi tentang pentingnya arkeologi yang memiliki peranan dan fungsi dalam berbagai sektor/bidang pembangunan.

Berbicara tentang apa yang diinformasikan perlu dibagi dalam tiga kategori:

- Bentuk informasi yang bersifat menanamkan arti pentingnya arkeologi yang bagi pejabat-pejabat masih banyak yang belum mengetahui. Untuk itu maka perlu ditekankan bahwa arkeologi erat kaitannya dengan mental spiritual bangsa, arkeologi erat dengan jatidiri dan kepribadian, erat dengan ketahanan budaya, rasa ikut memiliki, menanamkan dan meningkatkan kebanggaan nasional (Sukendar, 1993).

- Bentuk informasi yang mengedepankan tela'ah pengetahuan arkeologi secara murni (arkeologi untuk ilmu) dalam hal ini hasil-hasil penelitian yang diinformasikan harus bersifat akademis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bentuk informasi yang perlu disampaikan pada pejabat yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan, sehingga penanganan/pengelolaan arkeologi di daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan tiga kategori di atas, maka apa yang akan diinformasikan sudah barang tentu berbeda-beda. Untuk butir pertama, informasi harus bersifat mendidik. Informasi harus menyentuh kepentingan nasional yang mengacu pada arti pentingnya arkeologi dengan nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilaksanakan. Informasi harus dilakukan melalui ceramah-ceramah dari narasumber yang benar-benar menguasai materi.

Bentuk informasi yang kedua harus mengedepankan tela'ah arkeologi yang dilandasi oleh konsep-konsep arkeologi dengan menitikberatkan pada artefak-artefak analisis dan eksplanasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bentuk informasi untuk butir ketiga adalah mengacu pada peranan arkeologi dalam menunjang kinerja departemen, sehingga pejabat mengetahui bahwa arkeologi memberi sumbangan penting dalam tugas-tugas dan fungsi departemen. Dengan informasi yang disampaikan kepada para penentu kebijakan maka hal yang menjadi hambatan/permasalahan internal dapat diselesaikan. Informasi dititikberatkan pada kebutuhan dana operasional yang diperlukan sehingga penelitian yang penting bagi program departemen dapat dilaksanakan seperti juga pameran, seminar dan lain-lain dapat diinformasikan. Dengan kebutuhan dana yang cukup, maka arti dan fungsi arkeologi dalam program-program Departemen dapat berjalan, dan tugas pokok dan fungsi Balai Arkeologi sebagai ujung tombak penelitian arkeologi di daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

### **3.1.5 Siapa yang dapat menjadi partner kegiatan arkeologi**

Bentuk struktur organisasi di daerah tingkat I, kabupaten dan kota antara satu dan lainnya kadang-kadang berbeda-beda, tergantung dari selera

masing-masing. Hal ini sedikit menyulitkan dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi. Sampai saat ini yang dapat menjadi partner dalam penyebarluasan informasi antara lain:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  2. Dinas Pendidikan
  3. Museum Negeri maupun Museum khusus/swasta
  4. Perguruan Tinggi
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu instansi/unit daerah yang diharapkan dapat menjadi partner dalam penyebaran informasi. Bahkan lebih dari itu dapat pula dijadikan partner dalam penelitian arkeologi dan dapat menjadi penyangga dana. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unit yang paling cocok untuk penyebaran informasi, khususnya tentang hasil penelitian dari wilayah kerjanya. Bahkan penerbitan informasi yang berupa buku hasil penelitian semestinya dibiayai oleh Dinas dan disebarluaskan ke berbagai kalangan seperti camat, kepala-kepala Dinas, guru dan pejabat yang lain. Hal ini dapat diambil contoh seperti terlaksananya kegiatan penelitian dan penerbitan yang dilakukan melalui kerjasama dengan kabupaten Dompu, NTB.
  - Museum Negeri Propinsi merupakan partner yang dapat menjadi tempat kegiatan penyebarluasan informasi, khususnya dalam kegiatan-kegiatan pameran.
  - Perguruan Tinggi merupakan lembaga ilmiah sebagai pencetak kader arkeolog paling handal merupakan partner kerja dalam penyebarluasan informasi arkeologi kepada masyarakat luas dengan materi atau ilmu yang signifikan yang diperoleh melalui pendidikan formal di Fakultas.

### **3.1.5 Manfaat informasi**

Penyebarluasan informasi merupakan sarana penting untuk mengukur keberhasilan dari suatu unit penelitian seperti Balai Arkeologi. Informasi yang disebarluaskan oleh suatu unit, perlu dipantau. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan informasi tersebut dapat memberi sumbangan pengetahuan (wawasan arkeologi) kepada masyarakat. Sampai saat ini

masyarakat yang tinggal di suatu situs tidak atau kurang mengetahui tentang peninggalan arkeologi yang dimilikinya. Dalam penanganan dan pengelolaan arkeologi, mereka sering tidak diikutsertakan sehingga mereka terkesan acuh. Kalau hal ini terus terjadi maka sulit program pemerintah yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dapat dicapai. Informasi sangat penting artinya bagi peningkatan pengetahuan arkeologi. Dengan bahan-bahan informasi yang disampaikan kepada mereka maka mereka akan terpacu untuk mempelajari, mengetahui, memahami, melestarikan dan memanfaatkannya. Dengan pengetahuan ini maka diharapkan mereka dapat ikut andil dalam pengelolaan dan mereka akan merasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bahkan mereka akan merasa bangga memiliki tinggalan atau warisan budaya dan peradaban nenek moyang di masa lalu.

Informasi yang disampaikan secara ilmiah dalam bentuk eksplanasi dalam buku, majalah, paper (kertas kerja) dan lain-lain akan banyak manfaatnya bagi siswa, mahasiswa dan para peneliti yang bertugas di bidang penelitian arkeologi.

### **3.1.6 Parameter keberhasilan penyebarluasan informasi**

Hasil penyebaran informasi kebanyakan mengacu pada sifat-sifat abstrak, sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, untuk sementara mungkin hanya dapat dihitung secara kuantitatif, berapa jumlah kegiatan penyebarluasan informasi yang dilakukan di provinsi, kabupaten dan kota.

## **3.2 Pemasyarakatan dan kemitraan arkeologi**

Pada saat ini tampaknya sudah harus dipertimbangkan pengembangan dan pemasyarakatan arkeologi. Manfaat arkeologi tersebut bukan hanya mengacu pada arkeologi untuk ilmu tetapi harus mempertimbangkan obyek arkeologi untuk meningkatkan harkat masyarakat yang mewarisinya. Bergabungnya Puslitbang Arkenas ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sudah harus merubah cara pandang terhadap tinggalan arkeologi itu sendiri. Tinggalan arkeologi memberikan dan mencerminkan data dan latar belakang pendukungnya. Untuk penelitian arkeologi sudah selayaknya harus berakhir pada wawasan dan pandangan akademis yang dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi kemudian setelah itu apa yang dapat dikerjakan agar tinggalan arkeologi

tersebut dapat berfungsi ganda atau multifungsi antara lain untuk tempat studi arkeologi atau budaya, tempat hiburan, tempat rekreasi, untuk meningkatkan sector ekonomi masyarakat dan pariwisata. Dalam era otonomi daerah, kabupaten dan kota mulai memperhatikan aset-aset yang berupa tinggalan masa lalu. Kalau penggarapan tinggalan warisan yang berupa benda-benda masa lalu hanya untuk arkeologi maka bagi masyarakat di daerah hal itu kurang menarik. Menurut para birokrat dan penentu kebijakan penelitian arkeologi sudah tentu harus memiliki arti bagi pengembangan daerahnya. Untuk itu maka sebaiknya dalam penelitian arkeologi harus pula disertai dengan misi-misi yang lain misalnya untuk dipergunakan sebagai obyek yang dapat menarik masyarakat yang berkiprah dalam pariwisata, sehingga dapat menunjang kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Harapan daerah adalah keuntungan apa yang didapat dari kegiatan/penelitian tersebut.

Peningkatan kerjasama antara Puslitbang Arkenas dengan daerah memang perlu. Di satu pihak penelitian dapat berjalan sehingga mempercepat proses penanganan sumberdaya arkeologi. Yang kedua dapat memberikan sumbangan kepada daerah tentang system penanganan sumberdaya arkeologi yang memberikan keuntungan. Sebagai contoh, walaupun hasilnya belum menunjukkan hasil yang maksimal tetapi kerjasama Puslitbang Arkeologi Nasional dengan kabupaten-kabupaten seperti Jembrana, Dompu, dan Tenggarrong memberikan bukti tentang perhatian mereka untuk mengembangkan dan memanfaatkan situs-situs arkeologi bukan hanya untuk ilmu pengetahuan tetapi untuk keperluan-keperluan yang lain, yaitu pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk menambah income daerah dan memberikan kesempatan dan peluang pekerjaan.

Pemanfaatan situs arkeologi sebagai obyek wisata tidak selalu merusak situs. Sebagai contoh penataan situs Maros sebagai taman sekaligus obyek kunjungan wisata tetap lestari dan terjaga.

### **Kemitraan yang menunjang penelitian arkeologi**

Balai Arkeologi Denpasar dan Puslitbang Arkenas sekitar beberapa tahun terakhir telah melakukan kerjasama kemitraan yang sampai saat ini telah mewujudkan berbagai hasil antara lain:

- (1) Penerbitan buku berjudul "Pembangunan Sumberdaya Arkeologi, Budaya dan Pariwisata Dompu (Sukendar, 2005)

- (2) Tergalinya situs Arkeologi Penting yaitu Situs Nangasia (Purusa, Citha Yuliati, 2003), Situs So Langgodu (Sukendar, 2004), situs Batu Temu Gelang Kampung Finis (Kusumawati, 2005).
- (3) Direncanakannya penelitian ulang di Nangasia untuk persiapan pendirian museum local.
- (4) Direncanakan penelitian lanjutan/ekskavasi situs Dorobata.

Pandangan-pandangan tentang penelitian arkeologi dan paradigma penelitian arkeologi serta perubahan-perubahannya yang dilontarkan oleh Irfan Mahmud dan Daud Aris Tanudirjo menjadi sangat penting untuk mendukung program-program yang dilakukan melalui kerjasama antara unit-unit penelitian arkeologi dengan pemerintah daerah. Tujuan-tujuan penelitian arkeologi tidak lagi hanya dibutuhkan untuk ilmu arkeologi, tetapi penting juga untuk pengembangan sector lain yang dapat berjalan searah dan sejalan tanpa harus ada yang merugikan (Irfan Mahmud, Tanudirjo, 2001). Antara arkeologi dan pariwisata pada dasarnya saling menunjang.

Penelitian kerjasama/kemitraan dengan pemerintah kabupaten Jembrana telah berhasil mengumpulkan data yang lebih lengkap tentang sistem penguburan, pemanfaatan lahan kubur, bentuk-bentuk bekal kubur, tingkat umur kematian dan lain-lain (Kusumawati, 2004). Disamping itu juga telah berhasil membangun gedung sebagai persiapan pendirian museum terbuka. Masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini adalah penyelesaian casting belum semuanya dapat dilaksanakan dan penataannya. Keadaan lingkungan alam Gilimanuk dengan berbagai data budaya dan pesona alam sangat mendukung dan kondusif untuk penanganan dan pengembangan situs khususnya untuk wisata arkeologi, yang nantinya dapat didukung oleh sumberdaya budaya yang lain. Bila nantinya program pemanfaatan situs Gilimanuk sebagai pusat study arkeologi, pusat hiburan dan rekreasi serta sebagai obyek daerah tujuan wisata (DTW) terwujud, merupakan bukti nyata bahwa Puslitbang Arkenas/Balai Arkeologi telah dapat memberikan sumbangan kepada program-program yang merupakan kebijakan pemerintah/Budpar yaitu pemanfaatan situs arkeologi untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Hasil yang telah dicapai:

- (1) Penyusunan buku (siap cetak) tentang Sumberdaya Arkeologi Gilimanuk.

- (2) Casting rangka Gilimanuk (sebagian)
- (3) Pembangunan gedung untuk penataan hasil ekskavasi secara utuh.

#### **IV. Kesimpulan**

Pengelolaan data arkeologi erat kaitannya bahkan tidak dapat dipisahkan dengan penyebaran atau pemasyarakatan arkeologi. Selama ini dalam penyiapan data dan informasi dapat dikatakan masih berjalan di tempat dalam arti tidak ada perkembangan yang signifikan. Berbicara tentang pengembangan pengelolaan data dan informasi belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini diduga diakibatkan oleh beberapa aspek antara lain:

- Kurangnya ahli tentang cara pengembangan pengelolaan arkeologi, sementara kegiatan dibidang tersebut memerlukan sistem kerja yang berlatar belakang professional, ketekunan dan pengalaman.
- Tidak ada struktur organisasi yang khusus menangani masalah pengembangan pengelolaan arkeologi.
- Belum ada buku acuan yang baku untuk pengembangan pengelolaan arkeologi.

Untuk menangani pengembangan pengelolaan perlu ada sarana dan sumberdaya manusia. Sarana diantaranya berupa struktur organisasi yang mantap yang tepat guna. Disamping buku acuan yang baku, yang dapat dimanfaatkan di Balai Arkeologi seluruh Indonesia. Untuk sumberdaya manusia yang bertugas mengelola data informasi perlu memperoleh penambahan wawasan pengetahuan melalui sistem magang, kursus, penataran, bahkan kalau perlu studi khusus di luar negeri. Sementara secara administrasi bidang dokumentasi di Pusat dapat memberikan arah perkembangan data dan informasi arkeologi kepada Balai Arkeologi agar dapat berjalan sesuai dengan teknik dan strategi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.

Wadah-wadah pengelolaan data dan informasi harus terus digalakkan diantaranya pameran, seminar, penyuluhan, pengiriman buku-buku hasil penelitian dan lain-lain. Perlu disusun skala prioritas tentang kegiatan yang akan dilakukan di daerah-daerah. Penerbitan buku di Balai Arkeologi perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Penerbitan sedapat

mungkin ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Penerbitan tidak harus terbatas pada penerbitan ilmiah tetapi harus diperbanyak dengan penerbitan semi ilmiah dan populer. Penerbitan perlu disesuaikan dengan golongan yang akan diberikan informasi. Misalnya untuk anak didik paling dini tidak dapat diberikan informasi ilmiah tetapi harus yang cocok dan menarik bagi mereka. Ceritera-ceritera bergambar dengan bahasa yang singkat lugas dan komunikatif dengan anak murid merupakan suatu pilihan. Kemajuan dalam perekaman dokumentasi dengan digital merupakan suatu langkah praktis, tetapi perlu dipikirkan bagaimana dengan hasil dokumentasi yang harus tersedia untuk beberapa tahun mendatang. Sementara foto digital berupa rekaman yang bersifat tanpa film. Digital dapat dicetak tetapi hasil cetakan digital tersebut tidak akan dapat bertahan lama. Sementara perjalanan-perjalanan jauh yang memerlukan dana dan tenaga sulit untuk diulang untuk memperoleh hasil dokumentasi yang dapat disimpan.

Penyebaran informasi dan kemitraan dengan instansi lain dalam bentuk penelitian untuk berbagai kepentingan perlu ditingkatkan walaupun harus diantisipasi tentang dampak yang mungkin terjadi akibat kerjasama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anomim, 2004. *Laporan Penelitian*, "Survei Situs Prasejarah Bukit Doromanto dan So Langgodu, di Hu'u, Kabupaten Dompu, NTB", Proyek Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, Asdep Urusan Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Daud Aris Tanudirjo, 2001. "Wisata Arkeologi, antara Ilmudan Hiburan", dalam *Memediasi Masa Lalu*, diterbitkan oleh Balai Arkeologi Makassar dan Hasanuddin University Press.
- Irfan Mahmud, Moh, 2001. "Arkeologi Non Pemerintah dan Agenda Kerakyatan", dalam *Memediasi Masa Lalu*, diterbitkan oleh Balai Arkeologi Makassar dan Hasanuddin University Press.

- Kusumawati, Ayu, 2004. "Pemanfaatan Situs Gilimanuk", dalam Seri Penerbitan *Forum Arkeologi*, No. II/November 2004, Denpasar, Balai Arkeologi Denpasar.
- , 2005. "Batu Temu Gelang Kampung Finis, Dompu dan Ceritera Rakyat dalam Perspektif Masa Depan", dalam Seri Penerbitan *Forum Arkeologi*, No. I/Agustus 2005, Balai Arkeologi Denpasar.
- Mahaviranata, Purusa, 2003. *Laporan Penelitian Arkeologi*, "Ekskavasi Situs Nangasia Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat", Balai Arkeologi Denpasar.
- , 2005. "Nangasia Menuju Museum Arkeologi", *Khasanah Arkeologi, Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi*, Ed. Dr. I Made Sutaba, APU, IAAI Komda Bali, Balai Arkeologi Denpasar.
- Sukendar, Haris, 1993. *Dinamika dan Kepribadian Bangsa yang Tercermin dari Tradisi Megalitik di Indonesia*, Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Ahli Peneliti Utama, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sukendar, Haris dan Ayu Kusumawati, 2005. *Pengembangan Sumberdaya Arkeologi Budaya dan Pariwisata Dompu*, Ed. Purusa Mahaviranata dan Sudirman HAR, Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Masa Jabatan H. Abubakar Ahmad, SH.
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.17/HK.001/MKP.2005 tanggal 27 Mei 2005, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata*, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.